

Rakor PAD di Kecamatan Kumai: Bapenda Kobar Tanggapi Keluhan Masyarakat dan Dorong Sinergi Penguatan Pajak Daerah



MMC Kobar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Kumai. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (23/7) ini menjadi forum strategis untuk merumuskan solusi atas tantangan pengelolaan PAD, khususnya dari sektor perpajakan.

Rakor ini dihadiri oleh Kepala UPT PPD Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Sofwan, Kepala Bapenda Kobar, M. Nursyah Ikhsan, Camat Kumai, Abdul Gofur, serta seluruh lurah dan kepala desa se-Kecamatan Kumai.

Salah satu isu utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah keluhan masyarakat terhadap kerusakan jalan akibat tingginya lalu lintas angkutan berat dari luar daerah. Kendaraan bertonase besar, seperti truk fuso dari pelabuhan, dianggap menjadi penyebab menurunnya kualitas jalan di wilayah Kumai.

“Belum ada perbaikan jalan, tapi jalan sudah rusak karena kendaraan bermuatan melebihi tonase,” ujar salah satu tokoh masyarakat Kumai.

Masyarakat juga menyampaikan harapan agar proses pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih dipermudah, khususnya bagi kendaraan yang belum balik nama. Mereka menyoroti kendala administratif seperti keharusan menyertakan KTP pemilik lama yang kerap menyulitkan proses.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala UPT PPD Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Sofwan, menjelaskan bahwa saat ini telah dikembangkan aplikasi pendataan kendaraan bermotor untuk mendukung akurasi data dan mempermudah pelayanan pajak.

“Aplikasi ini diharapkan segera diterapkan di lapangan agar desa dapat langsung mendata kendaraan secara digital,” ungkap Ali.

Ali juga menjelaskan bahwa:

- Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilakukan di UPT PPD.
- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Samsat Keliling setiap Senin dan Selasa.

Selain itu, Ali menyampaikan informasi mengenai pembebasan pajak PKB dan BBNKB dalam rangka HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 25 Tahun 2025. Ia juga memaparkan sejumlah program prioritas provinsi seperti kewajiban kendaraan berpelat KH, dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta kewajiban pembelian BBM di wilayah Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kobar, M. Nursyah Ikhsan, menyampaikan bahwa pengelolaan pajak harus dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa PAD merupakan pilar utama pembiayaan pembangunan daerah.

“Target PAD Kobar tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp443 miliar, dan hingga saat ini realisasinya telah mencapai 37 persen,” ungkapnya.

Capaian tersebut terdiri dari:

- Pajak daerah
- Retribusi
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah, termasuk hasil lelang aset

Nursyah mengajak seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat kabupaten hingga desa, untuk terus bersinergi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

“Optimalisasi PAD hanya bisa tercapai jika ada kerja sama erat antara pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat,” tegasnya.

Rakor ini menjadi langkah awal yang penting dalam menata pengelolaan PAD secara lebih efektif di Kecamatan Kumai. Dengan menampung aspirasi warga, mendorong digitalisasi pelayanan, dan memperkuat sinergi antar level pemerintahan, Bapenda Kobar berupaya memastikan bahwa setiap rupiah dari pajak daerah dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Cerdas Pajak Bersama Sinpelaja

Lapor pajak sekarang bisa di Sentuh Pajak Kobar App lho, download sekarang di Google Play Store!